BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di BAPPENDA PEMPROV NTB melalui Pajak Kendaraan Bermotor adalah :
   a. Pemerintah mengintensifkan pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di kantor Badan Pengelola Pendapatan Asli Daerah (BAPPENDA). Hal itu dilakukan dengan menerapkan pedoman, mensosialisasikan peraturan terkait pajak daerah, serta melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan daerah..
   b. Ekstensifikasi wajib pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menggali objek atau subjek pajak yang baru atau yang belum terdaftar di adiministrasi.
   c. Penguatan kelembagaan sebagai bentuk strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sudah dijalankan dengan baik oleh BAPPENDA PEMPROV NTB. Dengan penguatan kelembagaan memberikan kualitas pelayanan yang baik dan mencerminkan pemerintahan yang efektif dan efisien.

2. Faktor-faktor penghambat penerimaan pajak kendaraan bermotor

   a. Hambatan Internal

      1) Ada beberapa kesenjangan dalam layanan wajib pajak, dan orang membayar pajak melalui bank.

      2) Ada sistem pembayaran pajak secara online, namun belum ada informasi kapan surat pemberitahuan akan dikirimkan kepada pemilik kendaraan bermotor.

   b. Hambatan Eksternal

      Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dicapai, penluis memberikan saran kepada UPTD Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut.:

1. UPTD Bapenda harus menjalin kerjasama dengan kejaksaan dan kepolisian agar lebih efektif mengadili kejahatan perpajakan dan mencegah wajib pajak tidak membayar pajaknya..
2. BAPPEDA memastikan wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak sehingga mereka dapat melaporkan pendapatannya secara akurat ke Bappeda. Ini akan membantu Bappeda mengumpulkan pajak dengan benar..
3. Bapenda harus melakukan strategi sosialisasi dan promosi terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui media sosial agar lebih dekat dengan masyarakat. Hal ini akan membantu Bapenda untuk selalu mengikuti

perkembangan teknologi terbaru dan memastikan bahwa pajak dikumpulkan secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Afifuddin Dan Saebani, B. A. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Pustaka Setia. Hlm. 56-58.

Anggraini, M. 2015. *Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatra Selatan.* https://core.ac.uk. Diakses pada 2 juni 2022 pukul 13: 48

Arenawati. 2014 *Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah Konsep Dan Penatalaksanaan Di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Bryson, M. J. 2005. *Perencana Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Karianga, H. 2013. *Politik Hokum (Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*). Jakarta.: Kencana Prenadamedia Group.

Miles, M. B. Dan Heberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Oleh Tjetjep Rohendi Rohadi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Mokoginta, dan Chairani, N. 2015. *Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal EMBA*.Universitas Sam Ratulangi Manado.http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7333/6835. Diakses pada 1 Juni 2022. Hal 1-10.

Moleong, 2011. *Metodelogi Penlitian Kualitatif*. Bandung: Rosda. Jurnal Ilmu adminitrasi. Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Moleong, 2016. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Nur, I. R. 2020. *Efektifitas Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Pulau Lombok (Study Di Bappenda Provinsi NTB)* (Doctoral Dissertation, Universitas Mataram). http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/17818. Diakses pada 1 Juni 2022. Pukul 13:32.

Patilma, H. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Rompis, N. E. 2015. *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada*

Samsat Airmadidi). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Universitas Sam Ratulangi. Manado.

http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9376/8955. Diakses pada 15 Januari 2016. Hal 1-12.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R dan D.* Bandung : Alfabeta.

Susilawati, K. E. (2013) *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publikpada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. E-Jurnal Akuntasi, 4(2), 345-357

Undang-Undang

Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No 5 Tahun 1974 Tentang Pokok- pokok Pemerintahan di Daerah

Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

LAMPIRAN

Kegiatan kerja sama Antar Perusahaan

Kegiatan Sosialisasi Tentang Pajak Kendaraan Bermotor

Wawancara dengan H. Muhammad Takiyudin Subki, SE., M.Si selaku Kabid Pajak Daerah

Wawancara dengan Hj. Eva Dewiyani, S.P selaku Kepala BAPPENDA Pemprov - NTB

Kegiatan Pembagian Browsur Pajak

Pembayaran Pajak melalui Samsat Keliling

Pegawai Pajak Baru di Provinsi NTB

Pembinaan Pedoman Praturan Pergub Provinsi NTB No. 22 Tahun 2017
tentang Perhitungan dasar pengenaan PKB